

KEBERADAAN KAWASAN AGROPOLITAN BELAJEN TERHADAP EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN ENREKANG

Haeruddin

Universitas 45 Bosowa
Jl. Urip Sumoharjo Km 4-5 Makassar
Haeruddin.saleh@yahoo.com

***Abstract.** This type of research used in this research is descriptive qualitative research. The problem of this research are: (1) The public response to the policy of regional development Agropolitan Belajen in Enrekang; and (2) the impact of regional development policies Agropolitan Belajen to the local economy in Enrekang. The research location is in Enrekang South Sulawesi province. Consideration researchers chose these locations is because researchers looked Enrekang as one of the districts in South Sulawesi implementing regional development policy based on agriculture with Agropolitan system. The analysis method used in this research is a model of data analysis techniques Miles and Huberman which consists of data reduction, a data display, and conclusion drawing / verification. The results show the role of government in this matter of government policy in supporting the development of the agricultural sector is very influential, the government can provide the infrastructure agropolitan, provision of economic institutions and the provision of the factors that affect the agricultural sector. So that agricultural productivity Enrekang area from year to year has increased and contributes to regional economic terhad. Sustainability agropolitan area in the district Enrekang can provide benefits to the community, especially the increase in production and incomes of farmers*

Abstrak. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Masalah penelitian ini adalah: (1) Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan daerah Agropolitan Belajen di Enrekang; dan (2) dampak dari kebijakan pembangunan daerah Agropolitan Belajen untuk perekonomian lokal di Enrekang. Lokasi penelitian adalah di provinsi Enrekang Sulawesi Selatan. Peneliti Pertimbangan memilih lokasi tersebut karena peneliti melihat Enrekang sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah berbasis pertanian dengan sistem Agropolitan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model teknik analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah dalam hal ini kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor pertanian sangat berpengaruh, pemerintah dapat memberikan agropolitan infrastruktur, penyediaan lembaga ekonomi dan penyediaan faktor-faktor yang mempengaruhi sektor pertanian. Sehingga produktivitas pertanian Enrekang daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan memberikan kontribusi untuk terhad ekonomi regional. Daerah agropolitan Keberlanjutan di distrik Enrekang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya peningkatan produksi dan pendapatan petani

Kata Kunci: Agropolitan, Pembangunan Ekonomi, Sektor Pertanian, Kebijakan Pembangunan.

PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan pedesaan selama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mempercepat industrialisasi pedesaan. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya pendapatan masyarakat pedesaan, terciptanya lapangan pekerjaan, tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya untuk konsumsi dan produksi, terwujudnya keselarasan hubungan ekonomi antara wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan, menguatnya pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatnya lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Dalam kaitan tersebut Pradhan (2008) menyatakan bahwa pembangunan pedesaan hanya dapat berkelanjutan apabila fasilitas prasarana dan sarana yang tersedia dapat menstimulasi serta mendorong aktivitas produksi dan pasar di wilayah pedesaan. Pedesaan sebagai pemasok hasil produksi pertanian dalam bentuk produk-produk primer harus didorong menjadi desa-desa yang mampu menghasilkan bahan olahan atau industri hasil pertanian sehingga menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi lokal (Gamma Epsilon, 2004).

Pembangunan pedesaan melalui pengembangan model agropolitan diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi dan menjawab berbagai permasalahan tersebut. Kabupaten Enrekang salah satu daerah yang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No 9 tahun 2009 dalam RTRW tahun 2009-2029 serta Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No 14 tahun 2008 dalam RPJPD tahun 2008-2028. Produksi unggulan kabupaten Enrekang adalah pada sektor pertanian khususnya hortikultura, namun dari data tahun 2011 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB kabupaten Enrekang sebesar 49,62 % jika dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu kontribusi terhadap PDRB sebesar 51,45 % ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kontribusinya mengalami penurunan, peranan dari pada pengembangan kawasan agropolitan sangat diharapkan untuk memberi kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Enrekang. Masalah penelitian ini adalah: (1) Tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan daerah Agropolitan Belajen di Enrekang; dan (2) dampak dari kebijakan pembangunan daerah Agropolitan Belajen untuk perekonomian lokal di Enrekang.

TINJAUAN TEORETIS

Konsep Agropolitan

Kawasan agropolitan didefinisikan sebagai kawasan yang mempunyai susunan fungsi sebagai kawasan permukiman pedesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Dari definisi tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat yang ada dalam kawasan agropolitan tidak hanya pada sektor primer atau agraris saja, melainkan terjadi diversifikasi pada kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan di

kawasan agropolitan harusnya bersifat multi sektoral, terpadu dan menyeluruh yang diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*)

Helmsing (2007) mengemukakan bahwa dalam pembangunan desa, penutupan wilayah secara selektif merupakan sebuah pendekatan di dalam membangun kekuatan masyarakat dari dalam dengan memanfaatkan semua potensi lokal yang ada. Pada dasarnya konsep ini sama dengan pendekatan agropolitan yang dikemukakan oleh Friedman tentang pembangunan yang berasal dari dalam (*endogenous*) yang didasarkan kepada masyarakat lokal, sumberdaya dan kapasitas lokal.

Lebih lanjut Mercado (2007) mengemukakan bahwa konsep agropolitan merupakan sebuah pendekatan perencanaan pembangunan dari bawah (*bottom-up*). Ciri-ciri dari agropolitan adalah skala geografis yang relatif kecil, tingginya tingkat kemandirian dalam membuat keputusan dan perencanaan, yang didasarkan kepada partisipasi dan kerjasama di tingkat lokal, aktifitas kegiatan pertanian dan non pertanian ditekankan pada industrialisasi desa dalam skala kecil, fungsi industri desa dan kota terlihat dari keterkaitan sumberdaya dan struktur ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya dan teknologi lokal.

Galdeano (2004) mengemukakan bahwa model pembangunan agropolitan yang diaplikasikan pada negara-negara terkebelakang khususnya bagi pembangunan wilayah pedesaan merupakan sebuah promosi dari inisiatif lokal pembangunan yang berpusat dari dalam. Inisiatif tersebut terlihat dari aktifitas lingkungan pedesaan yang beragam, perencanaan yang berasal dari bawah dan kualifikasi sumberdaya manusia yang ada di tingkat lokal.

Kementerian Pertanian RI (2010) mengeluarkan pedoman operasional pengembangan kawasan agropolitan yang mencakup tujuan dan sasaran, prinsip pemberdayaan, fase dan tahapan pelaksanaan program, fasilitasi pembiayaan dan indikator keberhasilan. Dalam pedoman operasional disebutkan bahwa agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, menarik dan mendorong kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya atau antar wilayah sehingga daerah-daerah yang ada wilayah kawasan agropolitan akan menikmati manfaat dari program yang dilakukan oleh pemerintah.

Kawasan agropolitan dapat berkembang dengan baik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : Tersedianya potensi sumberdaya lahan yang cukup luas dengan struktur tanah yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian; Memiliki kelembagaan dan prasarana/sarana agribisnis yaitu pasar untuk hasil pertanian, pasar sarana pertanian, pasar lelang serta gudang tempat penyimpanan dan processing hasil pertanian sebelum dipasarkan, lembaga permodalan agribisnis, Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis, memiliki kelembagaan petani yang berfungsi sebagai Sentra Pembelajaran dan pengembangan Agribisnis (SPPA) dan adanya percobaan/pengkajian teknologi agribisnis; Memiliki sarana dan prasarana umum; Memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan sosial; Menjamin kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pembangunan Ekonomi Daerah

Secara umum pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004). Tentu saja makna pembangunan daerah tersebut amat tergantung masalah fundamental yang dihadapi oleh daerah itu. Bagaimana daerah mengatasi masalah fundamental yang dihadapi ditentukan oleh strategi pembangunan yang dipilih. Menurut Bank Dunia, konteks Indonesia, peran pemerintah setidaknya mencakup peran minimal yang meliputi penyediaan barang-barang publik dan perlindungan terhadap si miskin. Namun, pemerintah juga bisa saja mengambil peran aktif, seperti mendorong kegiatan swasta dan redistribusi aset.

Oleh karena itu dalam pembangunan ekonomi daerah, peran pemerintah dapat mencakup peran-peran *entrepreneur*, koordinator, fasilitator dan stimulator (Blakely, 1989 dalam Kuncoro, 2004). Sebagai *entrepreneur*, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk jeli dan proaktif dalam mengembangkan bisnis daerah, termasuk dalam hal ini memanfaatkan asset pemerintah daerah, mendorong pertumbuhan bisnis daerah dan pemberdayaan masyarakat marginal. Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi bagi pembangunan di daerah. Dalam bidang pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi-informasi ekonomi seperti tingkat ketersediaan pekerjaan, angkatan kerja, pengangguran dan jumlah perusahaan.

Disamping itu Pemerintah Daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan mempertahankan yang ada. Sebagai fasilitator, Pemerintah Daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerah, antara lain dengan pengefisienan proses pembangunan.

Pemerintah Daerah dapat terfokus dalam memanfaatkan sumberdaya dan tenaga yang dimilikinya. Tujuan utama pembangunan dalam pengembangan otonomi asli desa adalah mengembangkan prakarsa dari dalam (*inward looking*), menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat (*autonomous energy*), sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah kepada masyarakat desa saat ini harus merupakan proses pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola pembangunan serta untuk mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih makro (Setyadi, 2000). Pembangunan pedesaan di pahami sebagai serangkaian aktivitas dan aksi dari beragam pelaku individu, organisasi, kelompok yang bahu membahu melakukan pembaharuan demi kemajuan (*progress*) berbagai sektor di wilayah pedesaan.

Mengacu pada Unicef (1999) dalam Sumarti AC dan Syaugar (2002) terdapat tujuh komponen kapasitas di tingkat komunitas yang dapat dikembangkan untuk

mendorong aktivitas-aktivitas ekonomi anggotanya melalui pembentukan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif yaitu:

Community leader, siapa saja orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat yang dapat mendorong penguatan kelompok usaha ekonomi produktif; *Community technology*, teknologi apa yang digunakan oleh masyarakat untuk memproduksi sesuatu, apa konsekwensinya dari suatu komunitas; *Community fund*, apakah ada mekanisme penghimpunan dana dalam masyarakat ; *Community material* : sarana apa saja yang ada dalam masyarakat yang berguna untuk pengembangan kelompok, apa modal usaha keluarga/komunitas; *Community knowledge*: apa persepsi masyarakat berkaitan dengan usaha mereka, apa harapan terhadap pelayanan ekonomi produktif, sejauhmana kepercayaan pada pelaku pelayanan ekonomi produktif; *Community decision making* : apakah masyarakat disertakan dalam program secara keseluruhan; *Community organization*: usaha ekonomi mana yang dapat berkembang menjadi organisasi ekonomi produktif.

Hal ini lebih menegaskan bahwa penyelenggaraan pembangunan daerah tidak semata-mata menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, tetapi juga berada dipundak masyarakat secara keseluruhan. Salah satu wujud rasa tanggung jawab yang dimaksud adalah sikap mendukung usulan dari warga masyarakat daerah terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang ditunjukkan dengan keterlibatan (partisipasi) aktif warga masyarakat. Aspek-aspek penting kehidupan masyarakat terdiri dari aspek social, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan pribadi. Oleh karena itu program pengembangan masyarakat hendaknya mempertimbangkan kesemua aspek kehidupan tersebut. Kendatipun demikian bukan berarti semua aspek tersebut harus ada pada setiap program pembangunan. Yang terpenting adalah mempelajari pada aspek mana komunitas cukup kuat dan pada aspek mana relatif lemah. Pada aspek yang lemah, masyarakat perlu memperoleh intervensi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2011). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) respon masyarakat terhadap kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan Belajen di Kabupaten Enrekang; dan (3) dampak kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan Belajen terhadap ekonomi masyarakat di Kabupaten Enrekang.

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena peneliti melihat Kabupaten Enrekang sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang melaksanakan kebijakan pengembangan daerah berbasis pertanian dengan sistem Agropolitan. Sedangkan situs penelitian adalah: (1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; (2) Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang, (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang dan (4) Masyarakat wilayah Kecamatan Allah.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles and Huberman yang terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

PEMBAHASAN

Ruang lingkup kawasan Agropolitan Belajen Kecamatan Alla. Luas kawasan perencanaan kurang lebih 457,60 Ha. Deliniasi kawasan perencanaan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terhadap batas administrasi, fisik nyata kawasan seperti pertunjuk alam (sungai, danau) dan petunjuk binaan (jalan, kanal, gang antar bangunan) serta karakteristik fungsional kawasan. Namun demikian, tetap dilakukan pengamatan dan kajian makro pada wilayah-wilayah sekitarnya yang diperkirakan memiliki koneksitas fisik dan non fisik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengembangan ruang kawasan perencanaan.

Masyarakat Kota Belajen sebahagian besar bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, dan sebahagian lagi berprofesi sebagai pegawai negeri dan pegawai swasta. Pola ketenagakerjaan yang ada di Kota Belajen sangat di pengaruhi oleh kualitas individu maupun sektor pendidikan yang ada. di bawah ini akan disajikan tabulasi jumlah masyarakat berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 1: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kawasan Agropolitan Tahun 2014

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	1.389	29,44
2	Pedagang	465	9,85
3	Peternak	310	6,57
4	Buruh	102	2,16
5	Pengangkutan	216	4,57
6	PNS	285	6,04
7	DII	1.950	41,33
Jumlah		4.717	100

Sumber : Kantor Kecamatan Alla, Tahun 2015

Dari tabel di atas jelas sekali bahwa struktur ekonomi di kabupaten Enrekang adalah pada sektor pertanian tanaman hortikultura, khususnya pada daerah Belajen. Tanaman hortikultura cukup berkembang di daerah ini yang didukung sumber daya alam yang melimpah dan kondisi iklim juga mendukung pengembangan tanaman hortikultura.

Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Enrekang

Setiap implementasi kebijakan akan menimbulkan dampak positif (*intended*) maupun negatif (*unintended*) dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan. Begitu juga kebijakan pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Enrekang

yang dalam pelaksanaan dari masing-masing kegiatan program kebijakannya menimbulkan dampak dan tingkat ketercapaian yang berbeda-beda. Berdasarkan kegiatan yang telah dipaparkan sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing kegiatan ke dalam beberapa kategori kegiatan sebagai indikator pencapaiannya. Adapun penilaian dampak dari masing-masing kategori kegiatan Agropolitan dapat disimpulkan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2: Dampak Kegiatan Program-program pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Enrekang

No	Indikator Kegiatan	Out Come	Penilaian
1.	Pengelolaan sarana prasarana pengelolaan pertanian hortikultura	Mempermudah masyarakat dalam proses produksi hortikultura	Tercapai
2.	Pengembangan bibit unggul	Meningkatkan ketersediaan dan penggunaan bibit unggul oleh masyarakat	Tercapai tetapi belum maksimal
3.	Peningkatan mutu intensifikasi melalui bantuan modal	Terbantunya petani yang membutuhkan modal	Tercapai
4.	Program peningkatan pendapatan petani	Meningkatkan pendapatan petani kecil	Tercapai
5.	Pengadaan sarana prasarana produksi	Meningkatkan kualitas lahan dan mempermudah masyarakat dalam pengelolaan pertanian	Tercapai
6.	Pengadaan sarana prasarana irigasi	Mempercepat proses kegiatan pertanian	Masih kurang
7.	Pengembangan infrastruktur	Memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat	Tercapai
8.	Pengembangan sarana prasarana pemasaran	Memperlancar proses pemasaran hasil produk pertanian	Tercapai

Sumber: hasil olahan peneliti

Namun secara keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan sudah mencapai target namun belum maksimal karena masih diperlukan upaya khusus dalam mempercepat pengembangan kawasan Agropolitan di Kabupaten Enrekang.

Dengan adanya kawasan agropolitan memberi dampak terhadap petani yang ada di kabupaten Enrekang, infrastruktur yang ada pada kawasan tersebut berupa jalan sudah baik sehingga mobilitas masyarakat dalam rangka kegiatan ekonomi dapat berkembang, ketersediaan sarana pemasaran sehingga hasil produksi pertanian berupa hortikultura dapat ditampung pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah, pasar tersebut merupakan sentral sehingga para pembeli yang datang kepasar tersebut yang ada pada kawasan Agropolitan, pasar ini juga dimanfaatkan daerah sekitarnya untuk memasarkan produk pertanian yang dihasilkan oleh daerah yang ada di sekitar kawasan Agropolitan. Tersedianya kelembagaan permodalan seperti perbankan sehingga petani yang ada pada

kawasan Agropolitan dapat dengan cepat mendapatkan modal untuk keperluan proses produksi pertanian.

Dampak Kawasan Agropolitan Terhadap Perekonomian Daerah

Keberadaan kawasan Agropolitan Belajen di Kabupaten Enrekang telah memberi pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah, sektor pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar pembangunan ekonomi daerah kabupaten Enrekang selama beberapa tahun ini, dan diproyeksikan bahwa produksi jenis tanaman yang dikembangkan di kabupaten Enrekang akan mengalami peningkatan tiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Proyeksi tanaman ini hingga tahun 2033 diperkirakan mencapai 656.630 ton dan jumlah produksi tersebut pada prinsipnya masih surplus bagi wilayah Kabupaten Enrekang. Kegiatan perdagangan antar wilayah maupun antar pulau sangat memungkinkan dengan hasil produksi tersebut. adapun hasil proyeksi jenis tanaman palawija dan hortikultura ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3: Proyeksi Hasil Produksi Tanaman Palawija dan Hortikultura di Kabupaten Enrekang Tahun 2013-2033

No	Tanaman Palawija	Tahun					Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
		2013	2018	2023	2028	2033	
1	Kacang Tanah	359	618	877	1.136	1.394	7,85
2	Kacang Hijau	96	140	184	228	273	5,11
3	Kacang edelai	802	1.118	1.433	1.749	2.064	6,49
4	Kentang	2.189	3.301	4.412	5.524	6.636	5,33
5	Kol/Kubis	46.808	66.525	86.242	105.959	125.676	5,24
6	Petsay/Sawi	4.437	6.723	9.009	11.294	13.580	4,68
7	Tomat	15.724	21.904	28.083	34.263	40.442	4,19
8	Bawang Merah	43.037	77.480	111.922	146.365	180.807	7,72
9	Bawang Daun	8.577	14.349	20.122	25.894	31.667	8,02
10	Jahe	42.517	63.856	85.196	106.535	127.874	6,22
11	Cabe Merah	3.536	4.898	6.260	7.623	8.985	3,87
12	Kacang Merah	2.918	4.779	6.639	8.500	10.360	9,68
13	Terung	15.640	30.139	44.639	59.139	73.639	7,46
14	Buncis	3.427	3.551	3.675	3.799	3.923	0,07
15	wortel	5.220	7.233	9.246	11.259	13.272	5,05
16	Kacang Panjang	634	804	974	1.144	1.314	3,08
17	Labu Siam	2.350	3.913	5.476	7.039	8.602	6,98
18	Bunga Kol	389	552	714	876	1.038	6,25
19	Mentimun	718	1.023	1.327	1.631	1.935	5,76
20	Bayam	373	459	545	631	717	4,23
21	Kangkung	954	1.008	1.063	1.117	1.172	0,99
22	Kunyit	188	288	388	488	588	6,36
23	Lengkuas	270	370	470	570	670	4,91
	Jumlah	201.164	315.030	428.897	542.763	656.630	5,46

Sumber : Hasil Analisis Tim

Prospek keberlanjutan kawasan agropolitan akan dapat memberikan kontribusi peningkatan produksi hasil pertanian tanaman hortikultura untuk masa yang akan datang, sehingga daerah Kabupaten Enrekang dapat menjadi sentra

produkti holtikultura untuk daerah Sulawesi Selatan bahkan secara nasional. Selain itu, penjualan hasil-hasil pertanian, mendukung tumbuhnya industri *agro-processing* skala kecil-menengah dan mendorong keberagaman aktivitas ekonomi dari pusat pasar. Segala aktivitas harus diorganisasikan terutama untuk membangun keterkaitan antara perusahaan di kota dengan wilayah suplai di perdesaan dan untuk menyediakan fasilitas, pelayanan, input produksi pertanian dan aksesibilitas yang mampu memfasilitasi lokasi-lokasi permukiman di perdesaan yang umumnya mempunyai tingkat kepadatan rendah dan lokasinya lebih menyebar. Investasi dalam bentuk jalan yang menghubungkan lokasi-lokasi pertanian dengan pasar merupakan suatu hal penting yang diperlukan untuk menghubungkan antara wilayah perdesaan dengan pusat kota

PENUTUP

Pengembangan kawasan agropolitan selain penyediaan infrastruktur yang memadai, yang tidak kalah pentingnya adalah pembedayaan masyarakat dalam kawasan agropolitan, apabila dikembangkan potensi yang ada pada masyarakat maka kawasan agropolitan akan berkembang artinya potensi masyarakat berupa inovasi, kemandirian, kerja keras, berani, berorientasi masa depan dan percaya diri, ini semua akan menjadi modal untuk berkembangnya kawasan agropolitan.

Peningkatan produktivitas dapat meningkat dengan tersedianya infrastruktur dan kelembagaan ekonomi. Pelatihan dan penyuluhan sangat menentukan dan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas dalam kegiatan masyarakat khususnya dalam bidang pertanian holtikultura. Pada analisis data juga didapat atau disimpulkan bahwa peningkatan produktivitas kegiatan pertanian holtikultura akan memberi pengaruh terhadap keberlanjutan dari pada pengembangan kawasan agropolitan.

Keberadaan kawasan agropolitan Belajen yang ada di kabupaten Enrekang memberi dampak terhadap peningkatan produksi pertanian khususnya tanaman holtikultura, dengan sendirinya memberi pengaruh terhadap perekonomian daerah dan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Argo, Teti. A. 2007. Menguak Keberpihakan Pada Perdesaan Di Indonesia: Membangun Hubungan Desa Kota Bagi Pembangunan Perdesaan, *Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan*, Vol. I No. 1, Juni 2005, <http://www.-infrastrukturperdesaan.org>.
- BPSDM Pertanian. 2008. *Pedoman Operasional Pengembangan Kawasan Agropolitan*, Departemen Pertanian RI.
- Dardak, H. 2009. Strategi Pengembangan Infrastruktur Dan Sarana Utama Di Kawasan Agropolitan. *Makalah Pada Workshop Pengembangan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan dan Wilayah Secara Berimbang*. Kerjasama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. dengan IPB. Bogor.

- Friedman, John. 1988. di dalam D.C Kortten dan Syahrir, *Pembangunan Agropolitan ; Sebuah Pendekatan Teritorial Guna Pemenuhan Kebutuhan Pokok*, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia.
- Galdeano, Rodriguez and Lorente. 2009. *Rural Multifunctionality in Europe : The Concept and Policies* (90th EAAE Seminar “Multifuncional Agriculture, Policies and Market : Understanding The Critical Linkage”-October 27-29,2004 - Rennes).
- Helmsing. 2010. *Partnership, Meso-Institution and Learning New Local and Regional Economic Development Initiatives in Latin America*, Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands, <http://worldbank.org/wbiep/decentralization/library15/Helmsing.pdf>.
- Mercado, G. Ruben. 2002. *Regional Development in The Philippines : A Review of Experience, State of The Art and Agenda for Research and Action*, Philippine Institute for Development Studies (PIDS), <http://www3.pids.gov.ph/ris/pdf/pidsdps0203.PDF>
- Tan, Firwan. 2007. *Pembangunan Sistem Usaha Ekonomi Inovatif di Daerah, Masalah dan Kebijakan*, FE-Unand Mei 2007.